

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak tahun 1947 Transmigrasi dijadikan sebagai suatu perubahan oleh Pemerintah Indonesia, berawal dari istilah kolonisasi yang awalnya dibentuk oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1905 di Indonesia. Tidak sekedar memindahkan penduduk dari daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang jarang penduduknya, lebih dari itu paradigma baru transmigrasi kini bertujuan untuk pemerataan pada berbagai aspek pengembangan seperti pendidikan, kesehatan, mental, dan kesejahteraan. Transmigrasi menjadi cara bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya sekaligus sebagai usaha membangun ketahanan pangan. Transmigrasi memiliki tiga sasaran utama sebagai modal pembangunan komunitas masyarakat yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan produktivitas masyarakat. Kedua, pembangunan kemandirian masyarakat pendatang atau masyarakat lokal. Ketiga, mewujudkan integrasi dan sinergitas masyarakat di wilayah transmigrasi.

Dalam pelaksanaan program transmigrasi selama ini memiliki dampak yang sejalan dengan tujuan serta sasaran transmigrasi, program ini efektif dalam menunjang kesuksesan usaha-usaha dalam pembangunan daerah, karena transmigrasi ini memindahkan penduduk pada daerah yang pada dahulunya belum diolah. Hal ini juga mempercepat perkembangan wilayah yang tertinggal karena dengan adanya transmigrasi maka akses terhadap wilayah tersebut terbuka seperti akses terhadap pendidikan, ekonomi dan teknologi menjadi mudah diakses. Berkat terlaksananya program transmigrasi telah tumbuh dan berkembang pusat-pusat ekonomi dan dalam beberapa hal bahkan telah menjadi ibu kota suatu kabupaten. Sampai pada data yang dicatat pada Februari 2011, telah terbentuk sebanyak 3.317 desa, 360 kecamatan, dan 101 kabupaten yang dilansir dari laporan yang dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian (2011). Hingga saat ini perekonomian di daerah transmigrasi menjadi terus berkembang pesat dan

menjadi salah satu faktor meningkatnya perekonomian di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pedesaan merupakan indikasi peningkatan kemakmuran penduduk dan pengurangan kemiskinan di Indonesia (Prihatin, 2012, p. 60).

Transmigran di Kabupaten Parigi Moutong didominasi oleh transmigran yang berasal dari Bali. Masyarakat Bali memiliki kesan sebagai penyelamat keadaan oleh pemerintah saat itu karena masyarakat Bali yang memiliki hubungan yang erat antar transmigran dan lingkungan alam yang kuat. Hal ini karena transmigran yang dikirim di teluk Tomini membuktikan bahwa kreativitas dan kerja keras masyarakat Bali ternyata dapat mengubah hutan belantara menjadi sawah dengan menghasilkan produk pangan yang sangat produktif di mana hal ini membantah teori Heijting sesuai dengan percobaan yang dilakukan di Bagelen tahun 1905 bahwa untuk menciptakan sawah tidak cukup hanya dengan memindahkan petani.

Penempatan masyarakat Bali oleh Deptrans di Parigi dimulai pada rentang tahun 1969 sampai 1973 sebanyak 1.852 keluarga Bali. Dengan mempertimbangkan keamanan dan kerukunan umat beragama serta kebiasaan masyarakat Bali yang saat itu masih suka memelihara ternak secara liar seperti Babi, Sapi, Ayam dan lain sebagainya, masyarakat Bali yang umumnya beragama Hindu ditempatkan dengan hati-hati dengan tidak mencampurkan transmigran Bali dengan transmigran dari daerah asal lain. Untuk menghindari konflik tersebut sehingga Deptrans mengelompokkan masyarakat Bali di perkampungan atau desa yang homogen. Namun demikian, karena kurangnya persiapan yang matang, perjanjian awal bahwa setiap keluarga diberikan fasilitas berupa tanah seluas 1,75 hektare sawah dan ladang yang luasnya tak ditentukan tidak didapatkan dengan semestinya karena kesalahan pengukuran yang mengakibatkan luas lahan yang tidak cukup. Akibatnya banyak dari mereka tidak mendapatkan lahan dengan luas yang semestinya bahkan beberapa dari mereka bahkan tidak memperoleh tanah satu petak pun. Tidak ada satu pun rumah siap huni yang dijanjikan pemerintah pada saat kedatangan mereka setelah lelah dalam perjalanan jauh. Apalagi irigasi yang dijanjikan.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, masyarakat Bali yang sejak dulu memiliki tradisi adat istiadat yang sangat kental memiliki dua kunci utama yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang kuat dan lingkungan alam yang cocok untuk mendukung rencana mereka. Jika di Jawa, kesetiakawanan terutama merupakan hasil jalinan rumit utang budi, di Bali kesetiakawanan diwujudkan secara formal dilingkungan kawasan desa yang disebut *banjar* dengan menggunakan tradisi *Ngayah*. *Banjar* merupakan suatu dewan komunitas yang beranggotakan laki-laki yang telah menikah dan berasal dari kampung yang sama, menyelenggarakan gotong royong (*Ngayah*). Semua pelaksanaan kerja yang memerlukan campur tangan komunitas merupakan kewenangan banjar termasuk pendirian pura, pengaturan jaringan irigasi, maupun keamanan. Tradisi *Ngayah* membuat mereka tidak mungkin menghindar dari kerja sama. Bila kepala keluarga sakit atau berhalangan dan dapat dibuktikan kebenarannya, ketidakhadirannya dapat dimaafkan. Namun sebaiknya ia digantikan oleh anak laki-laki atau kemenakannya. ketidakhadiran yang terjadi secara berturut-turut dianggap mencurigakan dan bagi yang malas berakibat membayar denda ke kas banjar. Besarnya denda dihitung berdasarkan biaya penggantian tenaga kerja. Denda yang tidak dibayarkan tentu mengakibatkan pengucilan oleh masyarakat. Dengan sendirinya, sanksi terberat semacam itu jarang terjadi dan tidak seorang pun masyarakat Bali yang bermaksud untuk memutuskan hubungan dengan masyarakatnya. (Levang, 2003, hal. 136-138)

Masyarakat Bali yang memiliki semangat tinggi dengan dua hari kerja secara gotong royong setiap minggunya, berhasil membuat petak-petak jaringan irigasi seluas 250 hektare. Dua bendungan dapat mengalirkan air sungai Torue dan anak sungainya, Sampaloe. Sebuah saluran primer mulai dari hulu sungai (sedalam 1 meter dan lebar 80 cm) yang semuanya dikerjakan dengan cangkul dan sekop, mengairi sawah-sawah. Penggalan saluran sekunder dan tersier dikerjakan sendiri-sendiri oleh pemilik sawah. Belum sampai tiga tahun setelah kedatangan mereka, masyarakat Bali telah memanen padi sawah mereka yang pertama. Mereka memanen setahun lebih awal daripada proyek terbaik yang pernah diselenggarakan oleh pemerintah

kolonial Belanda. Sementara itu, biaya pembangunannya hampir seluruhnya ditanggung oleh migran sendiri. (Levang, 2003, hal. 136-138)

Karena program transmigrasi yang dikirim ke Parigi dianggap sukses besar, Pada tahun 1980 transmigran dari Bali kembali dikirim ke daerah Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Kecamatan Bolano Lambunu yang saat ini sudah mekar menjadi Kecamatan Bolano. Pada saat itu pemerintah melakukan beberapa perbaikan, yaitu hak tanah yang dibagikan secara merata, serta dukungan pemerintah agar masyarakat Bali dapat menerapkan tradisi seperti pembentukan organisasi masyarakat serta tradisi ngayah yang dapat diterapkan untuk membangun daerah yang awalnya terdiri dari hutan belantara menjadi wilayah yang layak huni. Transmigran dari Bali yang saat itu berdampingan dengan transmigran dari Jawa berhasil membangun desa dan memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dengan bermodalkan gotong royong Sehingga berhasil membentuk beberapa desa, termasuk desa Wanamukti Barat

Dalam pandangan masyarakat Hindu sendiri, Ngayah sebagai perwujudan konsep gotong royong merupakan salah satu kearifan lokal di Bali dalam membangun kebersamaan dan menguatkan kesatuan umat Hindu di Bali. Gotong royong sendiri dapat diartikan dengan bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu (Widayati, 2020, hal. 1). Gotong royong yang diambil dari bahasa Jawa ini terdiri dari dua kata yaitu “Gotong” yang artinya angkat atau pikul, dan “royong” yang artinya bersama-sama. Berbeda dengan konsep kerja sama, gotong royong memiliki ciri khas kerakyatan, sama dengan penggunaan kata-kata demokrasi, persatuan, keterbukaan, kebersamaan, atau kata kerakyatan itu sendiri. Gotong royong tidak membedakan kelas sosial ataupun kelompok-kelompok sosial lainnya. Semua menjadi satu berbaur dan bekerja sama bahu membahu dalam mengerjakan sesuatu dengan tulus ikhlas (Widayati, 2020, hal. 4-5). Gotong royong adalah nilai-nilai yang bersumber dari kesadaran masyarakat Indonesia yang merupakan *Civic virtue* yang dijunjung tinggi oleh masyarakat serta diwariskan secara turun temurun. *Civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan merupakan salah satu unsur dari *Civic*

Culture (Budaya Kewarganegaraan) yang mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas dan semangat kemasyarakatan. Semua unsur dari akhlak kewarganegaraan diyakini akan saling memupuk *civil Society* atau masyarakat madani untuk Indonesia (Dewantara, Sulistyarini, & Afandi, 2022, hal. 868).

Tradisi Ngayah sebagai perwujudan nilai gotong royong memiliki ciri khas yang agak berbeda dari konsep gotong royong di daerah lain. Tradisi Ngayah ini merupakan tradisi yang mengikat masyarakat Bali dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di segala bidang terutama menjalani kehidupan keagamaan, adat, budaya, dan bermasyarakat. Ngayah merupakan komitmen sosial masyarakat Bali sebagai penerapan ajaran Karma Marga, dilakukan secara ikhlas dan gotong royong. Seperti dalam ungkapan bali “*Sing ngayah dadi bayah*” (tidak ngayah bisa dibayar) yang mengartikan bahwa ngayah tidak bisa dilakukan dengan hanya membayar, perlu dimilikinya kesadaran akan pentingnya esensi ngayah sebagai bentuk *Srada Bakti* tulus ikhlas, pemeliharaan nilai-nilai luhur dan bentuk wujud nyata dari sikap *menyamabraya* yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Bali. Secara etimologis, kata ngayah diambil dari kata “*ayah, ayahan, pengayah, ngayahang*” yang memiliki arti yang saling berhubungan yang secara spesifik mengacu pada tanah ayahan desa sebagai bagian integral tanah adat dan konsekuensinya. Ngayah merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang bersangkutan sebagai salah satu wujud tanggung jawab. Kewajiban ini dalam kaitanya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: kewajiban religius teritorial (seperti pura desa, pura keluarga, pura sawah, dll), kewajiban yang berkaitan dengan sosiokultural banjar adat (seperti kerjabakti adat, subak, acara pernikahan, acara potong gigi, acara kematian, dll), dan kewajiban berupa dedikasi dan loyalitas kepada raja-raja pada masa itu serta kepada orang suci (seperti melayani raja, melayani orang suci pada saat menjalankan upacara adat keagamaan, dll) (Mahendra, Civic Culture Dalam Pembelajaran PPKn, 2018, hal. 1245).

Hampir setiap waktu, segala kegiatan yang berorientasi pada peningkatan empati dan toleransi umat Hindu di Bali berdasarkan pada konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab kebahagiaan/kesejahteraan. Penyebab kesejahteraan/kebahagiaan itu bersumber pada keharmonisan. *Tri Hita Karana* terdiri dari *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*. *Parahyangan* merupakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan (vertikal ke atas), *Pawongan* adalah hubungan yang harmonis antar sesama manusia (horisontal) dan *Palemahan* adalah hubungan yang harmonis dengan lingkungan (vertikal ke bawah). Demi terciptanya keharmonisan dalam sosiokultural tentunya implementasi Ngayah dilandasi dalam hubungan yang penuh toleransi dengan dasar asah, asih dan asuh. Saling menghargai, saling mengasahi dan saling membimbing. Hubungan yang penuh empati antar manusia dalam praktik ngayah di banjar-banjar yang tersebar di seluruh Bali tentunya sebagai modal utama dalam menjaga dan meningkatkan toleransi intern umat beragama di Bali. Dengan atau tanpa disadari jika ngayah yang dilakukan tidak hanya memberikan pengaruh positif bagi kerukunan bermasyarakat namun juga dengan pelaksanaan ngayah dapat memberikan kepuasan dan memberi hati yang lebih luas untuk menerima keberagaman.

Pesatnya perkembangan transmigran masyarakat Bali di Parigi dengan menggunakan konsep ngayah membuktikan bahwa tradisi ngayah ternyata memiliki pengaruh besar terhadap pola adaptasi masyarakat Bali baik kepada alam, maupun lingkungan masyarakat lokalnya. Di samping itu, tradisi ngayah juga berperan dalam meningkatkan perkembangan perekonomian serta kemandirian masyarakat Bali dalam kehidupan sosialnya di daerah transmigrasi. Dalam Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, kajian mengenai bagaimana mengembangkan dan melestarikan nilai budaya lokal, erat kaitannya dalam pembentukan *Civic Culture* atau Budaya Kewarganegaraan. Winataputra (Winataputra, 2012, p. 56) menekankan bahwa budaya kewarganegaraan adalah budaya yang mendukung kewarganegaraan, merangkul seperangkat gagasan yang dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam referensi budaya untuk membentuk identitas

kewarganegaraan. budaya kewarganegaraan mengacu secara khusus pada budaya yang mendukung kewarganegaraan, yang mencakup seperangkat gagasan yang dapat secara efektif diwujudkan dalam pertunjukan budaya untuk membangun identitas kewarganegaraan. Dapat disimpulkan bahwa dalam budaya kewarganegaraan, budaya berperan sebagai penopang pembentukan identitas kewargaan. Oleh karena itu, budaya kewarganegaraan sangat erat kaitanya dengan *civic education*, *democratis civic society*, *civic virtue*, serta *civic community* atau *civic society*.

Menurut Kymlicka (Kymlicka, 2015, hal. 114) menyatakan bahwa budaya kewarganegaraan adalah kehidupan sosial sehari-hari yang diwujudkan dalam praktik-praktik meliputi sebagian besar kegiatan manusia. Dalam kehidupan sosial saat ini, agar budaya kewarganegaraan dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial sehari-hari maka harus diwujudkan secara institusional baik disekolah, lembaga masyarakat maupun pemerintah. Lebih lanjut, Winataputra (Winataputra, 2012, hal. 57). Mengungkapkan bahwa *civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warga negara.

Berbicara mengenai *civic culture* adalah berbicara tentang masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan etika dalam membangun peradaban. Adapun unsur dari budaya kewarganegaraan adalah “*civic virtue*” atau akhlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warganegara (Budimansyah & Winataputra, 2012). *Civic culture* merupakan suatu usaha untuk mempertahankan eksistensi budaya kewarganegaraan dalam suatu wilayah dengan melibatkan seseorang atau lembaga yang didasarkan atas nilai-nilai pada keterlibatan masyarakat di dalamnya (Hasibuan & Simatupang, 2021)

Menurut Wahab & Sapriya (Wahab & Sapriya, 2011, hal. 33) pendidikan kewarganegaraan akan membentuk warga negara yang mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bentuk hak dan kewajiban warga negara diluar dari pendidikan formal adalah dengan

mempertahankan budaya lokal sebagai identitas dan karakter bangsa. Dalam usaha membangkitkan budaya lokal, PKn dalam usaha pembangunan berkelanjutan adalah PKn yang dapat membentuk warga negara aktif membantu pemerintah. PKn juga berfungsi membantu pemerintah menghadapi tantangan kekinian (Rachman, 2016). Pendidikan kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai pendidikan karakter, etika, moral, yang di dalamnya terdapat karakter gotong royong, saling menghormati, dan religius. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang membentuk sikap kedewasaan manusia dalam melakukan segala tindakan, keputusan kritis dalam segala hal.

Penelitian tentang Tradisi Ngayah dan Civic Culture ini merupakan topik yang sangat menarik untuk diteliti, sehingga penelitian ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh I Nengah Agus Tripayana pada tahun 2016 dengan Judul “Civic Culture dalam Tradisi Magibung di Desa Pakraman Seraya, Karangasem – Bali” penelitian ini mengarah pada hubungan tradisi Magibung yang ada di Bali khususnya di Desa Pakraman Seraya, Karangasem dengan teori Civic Culture. Tradisi Magibung merupakan tradisi makan bersama yang menjadi tradisi unik di Desa Pakraman Seraya yang ternyata memiliki nilai-nilai Civic Culture dan aspek sosio budaya yang sangat baik. Penelitian kedua yang bisa dikatakan penelitian yang sangat dekat dengan yang sedang diteliti yaitu penelitian oleh Putu Ronny Angga Mahendra pada tahun 2018 dengan judul “ Civic Culture Ngayah dalam Pembelajaran PPKn” penelitian ini menitik beratkan nilai-nilai Civic Culture dalam tradisi ngayah yang bisa diadopsi dalam Pembelajaran PPKn di sekolah dengan mencantumkan pola pembelajaran pendekatan budaya khususnya yang terdapat pada tradisi Ngayah yang ada di Bali. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan penerapan Tradisi Ngayah yang ada di daerah Transmigrasi dengan kondisi masyarakat Bali terletak di daerah yang heterogen (berdampingan dengan banyak suku) yang tentunya berbeda dengan tradisi ngayah di Bali yang tinggal secara homogen. Berbeda dengan penelitian oleh Putu Ronny yang berfokus pada hasil yang

dilihat pada pendidikan Formal, pada penelitian ini peneliti berfokus pada dampaknya terhadap pendidikan informal yang terdapat pada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, Identifikasi masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini mengacu pada penjelasan Sekaran dan Bougie (Silalahi, 2015, hal. 51)

“A ‘problem’ does not necessarily mean that something is seriously wrong with a current situation that needs to be rectified immediately. A problem could also indicate an interest in an issue where finding the right answers might help to improve an existing situation. Thus, it is fruitful to define a problem as any situation where a gap exists between the actual and the desired ideal states.”

Di mana menurut Sekaran dan Bougie dalam jurnal (Silalahi, 2015), penelitian tidak selalu mengangkat hal-hal yang bersifat negatif, tetapi masalah penelitian juga dapat diangkat berdasarkan hal-hal yang menarik perhatian karena bersifat positif. Seperti dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang menarik dan bersifat positif sehingga peneliti tertarik untuk mendalaminya. Adapun identifikasi masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu, pertama masyarakat transmigran Bali yang dikirim ke Parigi dapat mengembangkan wilayahnya dengan meningkatkan produktivitas masyarakat dan berhasil membangun persawahan serta irigasi yang memadai dalam waktu yang relatif singkat di tengah kesulitan karena kekurangan lahan, fasilitas yang sangat tidak memadai dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemerintah saat itu dengan menggunakan tradisi Ngayah untuk membangun solidaritas antar transmigran Bali. Kedua, tradisi Ngayah yang dilakukan oleh masyarakat transmigran Bali ini ternyata tidak hanya mempengaruhi semangat Transmigran Bali saja, tetapi juga transmigran Jawa dan masyarakat penduduk asli di sekitarnya, karena tradisi Ngayah menerapkan semangat gotong royong sehingga memudahkan Transmigran Bali untuk beradaptasi dengan masyarakat di lingkungan sekitar serta menularkan semangat yang sama dalam membuka lahan pertanian dan membangun desa pada saat itu. Ketiga, tradisi Ngayah juga ternyata membangun toleransi masyarakat yang bertahan hingga saat ini, dibuktikan dengan Semangat gotong royong tradisi Ngayah yang masih diadopsi oleh masyarakat sekitar dan hubungan yang harmonis antar warga seperti saat

musim panen dan bercocok tanam serta sama-sama merayakan dan bersilaturahmi saat hari raya keagamaan yang berlangsung hingga saat ini.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana penerapan, perkembangan serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Ngayah* melalui sudut pandang *civic culture* dalam judul Tradisi *Ngayah* Masyarakat Suku Bali di Daerah Transmigrasi Sebagai *Civic Culture* (Studi Etnografi di Desa Wanamukti Barat, Kec. Bolano, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah). Adapun beberapa rumusan masalah yang diharapkan mampu menopang keberhasilan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

- a. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Tradisi *Ngayah* di daerah Transmigrasi Desa Wanamukti Barat sebagai *Civic Culture*?
- b. Bagaimana proses Penurunan nilai dari generasi ke generasi yang terkandung dalam tradisi *Ngayah* di daerah Transmigrasi Desa Wanamukti Barat sebagai *Civic Culture*?
- c. Apakah faktor yang menjadi determinan dalam melestarikan Tradisi *Ngayah* sebagai pembentukan *Civic Culture* pada masyarakat suku Bali di daerah transmigrasi Desa Wanamukti Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Tradisi *Ngayah* di daerah Transmigrasi Desa Wanamukti Barat sebagai *Civic Culture*
- b. Menganalisis proses Penurunan nilai dari generasi ke generasi yang terkandung dalam tradisi *Ngayah* di daerah Transmigrasi Desa Wanamukti Barat sebagai *Civic Culture*
- c. Menganalisa berbagai kendala dan upaya dalam melestarikan Tradisi *Ngayah* sebagai pembentukan *Civic Culture* pada masyarakat suku Bali di daerah transmigrasi Desa Wanamukti Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Teoritis

Manfaat Penelitian ini dari segi teoritis diharapkan mejadi sumber rujukan oleh para peneliti dalam bidang kajian ilmu sosial humaniora, terutama melalui keilmuan Pendidikan kewarganegaraan terkait bidang kajian *Civic Culture*. Memberikan manfaat sumbangan teori bagaimana pembentukan *civic culture* melalui implementasi budaya ngayah pada masyarakat suku Bali di daerah Transmigrasi. Diharapkan dapat menjadi masukan dalam penerapan pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan peserta didik yang berkarakter

1.4.2 Segi Kebijakan

Melalui penelitian ini, diharapkan memberi gambaran pada pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar memberikan dukungan baik secara materil maupun nonmateril terhadap program-program yang diinisiasi oleh perorangan maupun kelompok yang berguna bagi pelestarian adat dan budaya serta budaya sebagai warisan bangsa

1.4.3 Segi Praktik

- a. Dapat dianalisisnya nilai-nilai yang terdapat dalam Tradisi *Ngayah* di daerah Transmigrasi Desa Wanamukti Barat sebagai *Civic Culture*
- b. Dapat dianalisisnya proses Penurunan nilai dari generasi ke generasi yang terkandung dalam tradisi *Ngayah* di daerah Transmigrasi Desa Wanamukti Barat sebagai *Civic Culture*
- c. Dapat dianalisisnya berbagai kendala dan upaya dalam melestarikan Tradisi *Ngayah* sebagai pembentukan *Civic Culture* pada masyarakat suku Bali di daerah transmigrasi Desa Wanamukti Barat

1.4.4 Segi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi panutan bagi lembaga pemerintah dan juga lembaga adat di Desa Wanamukti Barat untuk

melestarikan tradisi yang menjadi suatu prinsip kehidupan masyarakat suku Bali di Wanamukti Barat